BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 00.3.2/KEP.1-HUK/2025
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, dengan Keputusan Bupati;

Me ngingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan Agenda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepada Perangkat Daerah pengusul atau terkait langsung secara substansi dengan agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tersebut, agar segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan mengoordinasikan bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dan memperhatikan tahapan/mekanismenya sesuai ketentuan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Perangkat Daerah masing-masing.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Januari 2024

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
Yth. 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 00.3.2/KEP.1-HUK/2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
2	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025		V	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
3	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Satu Data Daerah Kabupaten Bandung	Tata Kelola Satu Data Kabupaten Bandung		V	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
4	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		V		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
5	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029	V		a. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan b. Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
6	Renja Dinas Pendidikan Tahun 2026	Renja Dinas Pendidikan Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
7	Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026	Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
8	Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026	Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
9	Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2026	Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
10	Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026	Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
11	Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026	Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
12	Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Tahun 2026	Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
13	Renja Dinas Sosial Tahun 2026	Renja Dinas Sosial Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
14	Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026	Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
15	Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2026	Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
16	Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026	Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
17	Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026	Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
18	Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026	Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
19	Renja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026	Renja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
20	Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026	Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
21	Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2026	Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
22	Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026	Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
23	Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026	Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
24	Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2026	Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
25	Renja Dinas Kebudayaan dan Periwisata Tahun 2026	Renja Dinas Kebudayaan dan Periwisata Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
26	Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2026	Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
27	Renja Dinas Pertanian Tahun 2026	Renja Dinas Pertanian Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
28	Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026	Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
29	Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026	Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
30	Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026	Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
31	Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026	Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
32	Renja Badan Kuangan dan Aset Daerah Tahun 2026	Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
33	Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026	Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
34	Renja Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Tahun 2026	Renja Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
35	Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026	Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
36	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
37	Renja Kecamatan Cileunyi Tahun 2026	Renja Kecamatan Cileunyi Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
38	Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026	Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
39	Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2026	Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
40	Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026	Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
41	Renja Kecamatan Margahayu Tahun 2026	Renja Kecamatan Margahayu Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
42	Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2026	Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
43	Renja Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2026	Renja Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
44	Renja Kecamatan Katapang Tahun 2026	Renja Kecamatan Katapang Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
45	Renja Kecamatan Pemeungpeuk Tahun 2026	Renja Kecamatan Pemeungpeuk Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
46	Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2026	Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
47	Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026	Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
48	Renja Kecamatan Cimaung Tahun 2026	Renja Kecamatan Cimaung Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
49	Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2026	Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
50	Renja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026	Renja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
51	Renja Kecamatan Rancaekek Tahun 2026	Renja Kecamatan Rancaekek Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
52	Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2026	Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
53	Renja Nagreg Tahun 2026	Renja Kecamatan Nagreg Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
54	Renja Baleendah Tahun 2026	Renja Kecamatan Baleendah Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
55	Renja Pacet Tahun 2026	Renja Kecamatan Pacet Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
56	Renja Kertasari Tahun 2026	Renja Kecamatan Kertasari Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
57	Renja Ciparay Tahun 2026	Renja Kecamatan Ciparay Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
58	Renja Majalaya Tahun 2026	Renja Kecamatan Majalaya Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
59	Renja Ibun Tahun 2026	Renja Kecamatan Ibun Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
60	Renja Paseh Tahun 2026	Renja Kecamatan Paseh Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
61	Renja Solokanjeruk Tahun 2026	Renja Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
62	Renja Pasirjambu Tahun 2026	Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
63	Renja Ciwidey Tahun 2026	Renja Kecamatan Ciwidey Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
64	Renja Rancabali Tahun 2026	Renja Kecamatan Rancabali Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
65	Renja Soreang Tahun 2026	Renja Kecamatan Soreang Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
66	Renja Cangkuang Tahun 2026	Renja Kecamatan Cangkuang Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
67	Renja Kutawaringin Tahun 2026	Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2026	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
68	Perubahan Perbup Renja Dinas Pendidikan Tahun 2025	Renja Dinas Pendidikan Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
69	Perubahan Perbup Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025	Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
70	Perubahan Perbup Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025	Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
71	Perubahan Perbup Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025	Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
72	Perubahan Perbup Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
73	Perubahan Perbup Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025	Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
74	Perubahan Perbup Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Tahun 2025	Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
75	Perubahan Perbup Renja Dinas Sosial Tahun 2025	Renja Dinas Sosial Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
76	Perubahan Perbup Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025	Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
77	Perubahan Perbup Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025	Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c.Permendagri 86 Tahun 2017			
78	Perubahan Perbup Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c.Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
79	Perubahan Perbup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c.Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
80	Perubahan Perbup Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025	Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c.Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
81	Perubahan Perbup Renja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025	Renja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c.Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
82	Perubahan Perbup Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025	Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
83	Perubahan Perbup Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025	Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
84	Perubahan Perbup Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025	Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
85	Perubahan Perbup Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
86	Perubahan Perbup Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025	Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
87	Perubahan Perbup Renja Dinas Kebudayaan dan Periwisata Tahun 2025	Renja Dinas Kebudayaan dan Periwisata Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
88	Perubahan Perbup Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025	Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
89	Perubahan Perbup Renja Dinas Pertanian Tahun 2025	Renja Dinas Pertanian Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
90	Perubahan Perbup Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025	Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
91	Perubahan Perbup Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025	Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
92	Perubahan Perbup Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025	Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
93	Perubahan Perbup Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset	Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
	dan Inovasi Daerah Tahun 2025	2025			b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
94	Perubahan Perbup Renja Badan Kuangan dan Aset Daerah Tahun 2025	Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
95	Perubahan Perbup Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025	Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
96	Perubahan Perbup Renja Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Tahun 2025	Renja Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
97	Perubahan Perbup Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025	Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
98	Perubahan Perbup Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
99	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Cileunyi Tahun 2025	Renja Kecamatan Cileunyi Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
100	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025	Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
101	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2025	Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
102	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025	Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
103	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Margahayu Tahun 2025	Renja Kecamatan Margahayu Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
104	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2025	Renja Kecamatan Margaasih Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
105	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025	Renja Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
106	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Katapang Tahun 2025	Renja Kecamatan Katapang Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
107	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Pemeungpeuk Tahun 2025	Renja Kecamatan Pemeungpeuk Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
108	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2025	Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
109	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025	Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
110	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Cimaung Tahun 2025	Renja Kecamatan Cimaung Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
111	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2025	Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
112	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Cicalengka Tahun 2025	Renja Kecamatan Cicalengka Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
113	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Rancaekek Tahun 2025	Renja Kecamatan Rancaekek Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
114	Perubahan Perbup Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025	Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
115	Perubahan Perbup Renja Nagreg Tahun 2025	Renja Kecamatan Nagreg Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
116	Perubahan Perbup Renja Baleendah Tahun 2025	Renja Kecamatan Baleendah Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
117	Perubahan Perbup Renja Pacet Tahun 2025	Renja Kecamatan Pacet Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
118	Perubahan Perbup Renja Kertasari Tahun 2025	Renja Kecamatan Kertasari Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
119	Perubahan Perbup Renja Ciparay Tahun 2025	Renja Kecamatan Ciparay Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
120	Perubahan Perbup Renja Majalaya Tahun 2025	Renja Kecamatan Majalaya Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
121	Perubahan Perbup Renja Ibun Tahun 2025	Renja Kecamatan Ibun Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
122	Perubahan Perbup Renja Paseh Tahun 2025	Renja Kecamatan Paseh Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
123	Perubahan Perbup Renja Solokanjeruk Tahun 2025	Renja Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
124	Perubahan Perbup Renja Pasirjambu Tahun 2025	Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
125	Perubahan Perbup Renja Ciwidey Tahun 2025	Renja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
126	Perubahan Perbup Renja Rancabali Tahun 2025	Renja Kecamatan Rancabali Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
127	Perubahan Perbup Renja Soreang Tahun 2025	Renja Kecamatan Soreang Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
128	Perubahan Perbup Renja Cangkuang Tahun 2025	Renja Kecamatan Cangkuang Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
129	Perubahan Perbup Renja Kutawaringin Tahun 2025	Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2025	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
130	Renstra Dinas Pendidikan	Renstra Dinas Pendidikan	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
131	Renstra Dinas Kesehatan	Renstra Dinas Kesehatan	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
132	Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
133	Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
134	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
135	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
136	Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah	Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
137	Renstra Dinas Sosial	Renstra Dinas Sosial	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
138	Renstra Dinas Ketenagakerjaan	Renstra Dinas Ketenagakerjaan	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
139	Renstra Dinas Pangan dan Perikanan	Renstra Dinas Pangan dan Perikanan	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
140	Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
141	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
142	Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
143	Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
144	Renstra Dinas Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
145	Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
146	Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
147	Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
148	Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga	Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
149	Renstra Dinas Kebudayaan dan Periwisata	Renstra Dinas Kebudayaan dan Periwisata	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
150	Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip	Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
151	Renstra Dinas Pertanian	Renstra Dinas Pertanian	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
152	Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
153	Renstra Sekretariat Daerah	Renstra Sekretariat Daerah	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
154	Renstra Sekretariat DPRD	Renstra Sekretariat DPRD	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
155	Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
156	Renstra Badan Kuangan dan Aset Daerah	Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
157	Renstra Badan Pendapatan Daerah	Renstra Badan Pendapatan Daerah	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
158	Renstra Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Renstra Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
159	Renstra Inspektorat Daerah	Renstra Inspektorat Daerah	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c.Permendagri 86 Tahun 2017			
160	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c.Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
161	Renstra Kecamatan Cileunyi	Renstra Kecamatan Cileunyi	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c.Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
162	Renstra Kecamatan Cilengkrang	Renstra Kecamatan Cilengkrang	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c.Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
163	Renstra Kecamatan Cimenyan	Renstra Kecamatan Cimenyan	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c.Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
164	Renstra Kecamatan Bojongsoang	Renstra Kecamatan Bojongsoang	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c.Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
165	Renstra Kecamatan Margahayu	Renstra Kecamatan Margahayu	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
166	Renstra Kecamatan Margaasih	Renstra Kecamatan Margaasih	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
167	Renstra Kecamatan Dayeuhkolot	Renstra Kecamatan Dayeuhkolot	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
168	Renstra Kecamatan Katapang	Renstra Kecamatan Katapang	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
169	Renstra Kecamatan Pemeungpeuk	Renstra Kecamatan Pemeungpeuk	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
170	Renstra Kecamatan Arjasari	Renstra Kecamatan Arjasari	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
171	Renstra Kecamatan Pangalengan	Renstra Kecamatan Pangalengan	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
172	Renstra Kecamatan Cimaung	Renstra Kecamatan Cimaung	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
173	Renstra Kecamatan Banjaran	Renstra Kecamatan Banjaran	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
174	Renstra Kecamatan Cicalengka	Renstra Kecamatan Cicalengka	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
175	Renstra Kecamatan Rancaekek	Renstra Kecamatan Rancaekek	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
176	Renstra Kecamatan Cikancung	Renstra Kecamatan Cikancung	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
177	Renstra Nagreg	Renstra Kecamatan Nagreg	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
178	Renstra Baleendah	Renstra Kecamatan Baleendah	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
179	Renstra Pacet	Renstra Kecamatan Pacet	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
180	Renstra Kertasari	Renstra Kecamatan Kertasari	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
181	Renstra Ciparay	Renstra Kecamatan Ciparay	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017			
182	Renstra Majalaya	Renstra Kecamatan Majalaya	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
183	Renstra Ibun	Renstra Kecamatan Ibun	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
184	Renstra Paseh	Renstra Kecamatan Paseh	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
185	Renstra Solokanjeruk	Renstra Kecamatan Solokanjeruk	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
186	Renstra Pasirjambu	Renstra Kecamatan Pasirjambu	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
187	Renstra Ciwidey	Renstra Kecamatan Ciwidey	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
188	Renstra Rancabali	Renstra Kecamatan Rancabali	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
189	Renstra Soreang	Renstra Kecamatan Soreang	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
190	Renstra Cangkuang	Renstra Kecamatan Cangkuang	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
191	Renstra Kutawaringin	Renstra Kecamatan Kutawaringin	V		a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Permendagri 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
192	Budaya Riset dan Inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Riset dan Inovasi Daerah	V		Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
193	Pembinaan Riset dan Inovasi Kepada Pemerintahan Desa	Riset dan Inovasi Daerah	V		Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
194	Pedoman Penyusunan Naskah Hasil Kajian di Lingkup Pemda Kabupaten Bandung	Riset dan Inovasi Daerah	V		Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
195	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK	Riset dan Inovasi Daerah	V		Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
196	Penyelenggaraaan Koordinasi dan Sinergi Riset dan Inovasi	Riset dan Inovasi Daerah	V		Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
197	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Riset dan Inovasi Daerah	V		Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
198	Pengharagaan Riset dan Inovasi	Riset dan Inovasi Daerah	V		Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
199	Program Inovasi Lingkup Riset dan Inovasi Daerah	Riset dan Inovasi Daerah	V		Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
200	Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	Riset dan Inovasi Daerah	V		Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
201	Strategi Sanitasi Kabupaten	Strategi Sanitasi Kabupaten	V		a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2025	
202	Gerakan Bersama Percepatan dan penurunan Stunting Terintegrasi Berbasis Geospasial Di Kabupaten Bandung	Pembuatan Pedoman Gerakan Bersama Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi Berbasis Geospasial Baru	V		Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Dinas Kesehatan	2025	
203	Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi	Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Tukang Gigi Wilayah Kabupaten Bandung Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan	V		Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 21);	Dinas Kesehatan	2025	
204	Pola Tata Kelola BLUD RSUD Tegalluar	Identitas, prinsip tata kelola, kelembagaan dan pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang BLUD	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Usaha Daerah	Dinas Kesehatan	2025	
205	SPM BLUD RSUD Bedas Tegalluar	Prinsip, jenis pelayanan, indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal	V		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	2025	
206	Pola Tata Kelola BLUD RSUD Bedas Arjasari	Identitas, prinsip tata kelola, kelembagaan dan pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang BLUD	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Usaha Daerah	Dinas Kesehatan	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
207	SPM BLUD RSUD Bedas Arjasari	Prinsip, jenis pelayanan, indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal	V		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	2025	
208	Peraturan internal RSUD Bedas Kertasari	Peraturan Bupati Bandung ini memuat terkait aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit melalui Peraturan Internal RUmah Sakit (Hospital By Law)	V		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Law)	Dinas Kesehatan	2025	
209	Peraturan Internal RSUD Bedas Cimaung	Peraturan Bupati Bandung ini memuat terkait aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit melalui Peraturan Internal RUmah Sakit (Hospital By Law)	V		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Law)	Dinas Kesehatan	2025	
210	Peraturan Internal RSUD Bedas Tegalluar	Peraturan Bupati Bandung ini memuat terkait aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit melalui Peraturan Internal RUmah Sakit (Hospital By Law)	V		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Law)	Dinas Kesehatan	2025	
211	Peraturan Internal RSUD Bedas Arjasari	Peraturan Bupati Bandung ini memuat terkait aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit melalui Peraturan Internal RUmah Sakit (Hospital By Law)	V		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Law)	Dinas Kesehatan	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
212	Peraturan Internal RSUD Oto Iskandar Di Nata	Peraturan Bupati Bandung ini memuat terkait aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit melalui Peraturan Internal RUmah Sakit (Hospital By Law)	V		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Law)	Dinas Kesehatan	2025	
213	Peraturan Internal RSUD Majalaya	Peraturan Bupati Bandung ini memuat terkait aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit melalui Peraturan Internal RUmah Sakit (Hospital By Law)	V		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Law)	Dinas Kesehatan	2025	
214	Peraturan Internal RSUD Cicalengka	Peraturan Bupati Bandung ini memuat terkait aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit melalui Peraturan Internal RUmah Sakit (Hospital By Law)	V		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Law)	Dinas Kesehatan	2025	
215	Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Bandung	Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Bandung	V			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025	
216	Pendaftaran Penduduk Non Permanen di Kabupaten Bandung	Pendaftaran Penduduk Non Permanen di Kabupaten Bandung	V			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025	
217	Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung	Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung	V			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
218	Pembentukan UPTD Dukcapil di Kabupaten Bandung	Pembentukan UPTD Dukcapil di Kabupaten Bandung	V			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025	
219	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029	berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana	V		Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025	
220	Rencana Kontingensi Banjir Tahun 2025-2027	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontingensi	V		Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025	
221	Rencana Kontingensi Longsor Tahun 2025-2027	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat	V		Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
		dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontingensi						
222	Forum Pengurangan Risiko Bencana (Fprb) Kabupaten Bandung	bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam upaya pengurangan risiko bencana, perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Untuk itu, dibutuhkan aturan dalam rangka memberikan panduan terhadap Forum Pengurangan Risiko Bencana di wilayah Kabupaten Bandung	V		UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
223	Rambu Kebencanaan	bahwa dalam rangka melindungi warga Kabupaten Bandung yang berpotensi timbulnya ancaman bencana perlu penyampaian informasi bencana melalui ketersediaan petunjuk yang standar berupa rambu kebencanaan di dalam gedung	V		UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Permen PU 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Permen PU 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 tahun 2014 tentang Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
					bencana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2009 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional			
224	Satuan Pendidikan Aman Bencana (Spab) Kabupaten Bandung	bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran akan risiko bencana, memperkuat kapasitas satuan pendidikan dalam menghadapi bencana, dan melindungi keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan aturan mengenai program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana di wilayah Kabupaten Bandung.	V		Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sekolah Madrasah Aman dari Bencana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
225	Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Di Kabupaten Bandung	Bahwa terdapat beberapa klausul yang terdapat di Perbup 248 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan		V	1. UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Pedoman penetapan status keadaan darurat bencana BNPB Tahun 2016	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
		Bencana, sehingga perlu penyesuaian materi Perbup dengan peraturan diatasnya/ pedoman penetapan status keadaan darurat bencana BNPB.			4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga			
226	Klaster Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung	Bahwa untuk mendukung penanganan darurat bencana diperlukan koordinasi multipihak melalui pendekatan klaster penanggulangan bencana yang aktif pada tahap prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana	V		UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024 Tentang Klaster Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025	
227	Pedoman Pemberian Insentif Bagi Bunda Literasi RW	Pedoman Pemberian Insentif Bagi Bunda Literasi RW	V		Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007)	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2025	
228	Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah	Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah	✓		Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
229	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
	Daerah							
230	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
231	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
232	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
233	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
234	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DPUTR	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
235	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISPERKIMTAN	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
236	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinsos	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
237	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Disnaker	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
238	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DP2KBP3A	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
239	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DLH	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
240	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISDUKCAPIL	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
241	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DPMD	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
242	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISHUB	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
243	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISKOMINFO	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
244	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
245	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISPORA	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
246	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISDAGIN	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
247	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISTAN	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
248	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISPAKAN	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
249	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISDAMKAR	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
250	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja SATPOL PP	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
251	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISBUDPAR	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
252	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISKOP UKM	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
253	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISPUSIP	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
254	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BAPPERIDA	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
255	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BKAD	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
256	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BAPENDA	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
267	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BKPSDM	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
268	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BAKESBANGPOL	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
269	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BPBD	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
270	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan	Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
271	Kelas Jabatan ASN	Kebijakan Pengaturan Kelas Jabatan ASN pada Perangkat Daerah	✓		Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
272	Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi	Roadmap Reformasi Birokrasi		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
273	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	✓		Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
274	Perubahan atas Kebijakan Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	Kebijakan TP ASN		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
275	Kebijakan Tambahan Penghasilan ASN	Kebijakan tambahan penghasilan ASN	✓		Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
276	Pakaian Dinas ASN	Kebijakan implementasi sistem akuntanbilitas kinerja instansi	✓		Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
277	Proses Bisnis Ketatalaksanaan dan Yanlik	Proses Bisnis Ketatalaksanaan dan Yanlik	✓		Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
278	Sistem Kerja Proses Bisnis Ketetalaksanaan dan Yanlik	Sistem Kerja Proses Bisnis Ketetalaksanaan dan Yanlik		✓	Perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	Bagian Organisasi	2025	
279	Jabatan Fungsional		✓		2025	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2025	
280	Perbup Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Asn Di Lingkungann Pemerintah Kab Bandung	Perubahan Pada Persyaratan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pada Perangkat Daerah Dan Beberapa Tambahan/ Perubahan Apabila Diperlukan		✓	2025	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2025	
281	Perbup Pengelolaan Kinerja ASN	Pengelolaan Kinerja	✓		2025	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
282	Penilaian Kompetensi			✓	2025	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2025	
283	Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat				2025		2025	
284	Perbup Penghargaan	Penghargaan	✓		2025	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2025	
285	Perbup Pendelegasian Kewenangan	Pendelegasian Wewenang		✓	2025	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2025	
286	Perbup Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	Pendelegasian Wewenang		✓	2025	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2025	
287	Cuti	Cuti	✓		2025	Badan kepegawaian dan Pengembangan	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
						Sumber Daya Manusia		
288	Disiplin	Disiplin Aparatur Sipil Negara		✓	2025	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2025	
289	Pola Karier	Pola Karier		✓	2025	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2025	
290	Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS				2025	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2025	
291	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025	✓		2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
292	Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun	Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja	✓		2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
	Anggaran 2026							
293	Penjabaran Perubahan APBD 2025	Penjabaran Perubahan APBD 2025	✓		2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
294	Penjabaran APBD 2026	Penjabaran APBD 2026	✓		2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
295	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	✓		2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
296	Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2025	Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2025	✓		2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
297	Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2025	Perubahan Kedua Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2025		✓	2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
298	Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	✓		2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
299	RAD Pencegahan Penanganan Tindak	RAD Pencegahan Penanganan Tindak Pidana	✓		2025	DP2KBP3A	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
	Pidana Perdagangan Orang 2025-2029	Perdagangan Orang 2025-2029						
300	Grand Desain Pembangunan Kependudukan 2025-2045	Grand Desain Pembangunan Kependudukan 2025-2045	✓		2025	DP2KBP3A	2025	
301	Perubahan Perbup tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kab Bandung	Perubahan Perbup tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kab Bandung		✓	2025	DP2KBP3A	2025	
302	Peraturan Pelaksanaan Perda tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Pelaksanaan Perda tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	✓		2025	DPMPTSP	2025	
303	Perubahan Perbup Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP	Perubahan Perbup Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP		✓	2025	DPMPTSP	2025	
304	Peraturan Pelaksanaan Perda Penanaman Modal	Peraturan Pelaksanaan Perda Penanaman Modal	✓		2025	DPMPTSP	2025	
	Petunjuk Pelaksanaan Perda 11 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa	Perubahan Plafon Pinjaman		✓	2025	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir kepada Masyarakat melalui Lembaga Keuangan Bank							
	Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa	Kode Etik Pelaku Pengadaan dan majelis Pertimbangan		✓	2025	Bagian Pengadaan Barang dan Jawa	2025	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"

Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Penamaan Peraturan Bupati
Kolom 3 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati
Kolom 4 : Penyusunan status Peraturan Gubernur dengan memilih apakah Perbup baru dibuat atau Perbup perubahan.
Kolom 5 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Bupati, meliputi:
Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
rencana pembangunan daerah;
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; atau
aspirasi masyarakat daerah.
Kolom 6 : PD terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Bupati
Kolom 7 : Tahun penyelesaian Peraturan Bupati
Kolom 8 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Bupati

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"